



**BUPATI GARUT  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 70 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GARUT,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu disusun Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022;
- b. bahwa sehubungan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, maka sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 232);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1);

18. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139);
19. Peraturan Bupati Garut Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 38);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2022.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut.
5. Rencana Kerja Badan Tahun 2022, yang selanjutnya disebut Renja Badan Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

**BAB II**

**SISTEMATIKA DAN PELAKSANAAN**

**Pasal 2**

Renja Badan Tahun 2022 berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah, RKPD Tahun 2022 dan hasil evaluasi Renja Badan tahun lalu.

**Pasal 3**

(1) Renja Badan Tahun 2022 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA BADAN TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN BADAN

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN

BAB V : PENUTUP

(2) Renja Badan Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 4**

Renja Badan Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dijadikan pedoman untuk menyusun RKA Badan Tahun Anggaran 2022.

**BAB III**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 19 - 7 - 2021**

**BUPATI GARUT,**

t t d

**RUDY GUNAWAN**

**Diundangkan di Garut  
pada tanggal 19 - 7 - 2021**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,**

t t d

**NURDINYANA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT  
TAHUN 2021 NOMOR 70**

Mengetahui  
Sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH,  
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,  
u.b.

**LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 70 TAHUN 2021  
TENTANG RENCANA KERJA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN  
POLITIK TAHUN 2022**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

RKPD Kabupaten Garut Tahun 2022 disusun dengan tahapan meliputi persiapan penyusunan RKPD, penyusunan rancangan awal RKPD, penyusunan rancangan RKPD, pelaksanaan musrenbang RKPD, perumusan rancangan akhir RKPD dan penetapan RKPD. Prinsip-prinsip dalam penyusunan RKPD Tahun 2022 meliputi:

- a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- b. dilakukan pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
- c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah;
- d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing Daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan Daerah dan nasional.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Garut merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut (RPJMD Kabupaten Garut) Tahun 2019–2024, serta mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Propinsi Jawa Barat. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

tentang Cipta Kerja. RKPD tersebut memuat evaluasi dan capaian kinerja tahun lalu, rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah, prioritas dan sasaran pembangunan daerah, rencana program dan prioritas daerah, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, Pasal 69 ayat (2) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 dan Pasal 17 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, RKPD merupakan dasar / pedoman untuk penyusunan Rancangan APBD. Hal tersebut memiliki konsekuensi bahwa rencana kerja, program dan kegiatan yang termuat dalam RKPD harus terukur dan dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran. Undang-undang seperti dijelaskan di atas memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi Kabupaten Garut untuk menciptakan kemandirian dalam rangka membangun daerahnya dengan berpijak pada prinsip-prinsip demokratis, partisipasi masyarakat, pemerataan, keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal.

Prinsip-prinsip tersebut dapat menjadi dasar pembangunan untuk mewujudkan "**Terwujudnya Kabupaten Garut Yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera**". Pembangunan Kabupaten Garut dengan menggunakan prinsip-prinsip tersebut diharapkan mampu mewujudkan pembangunan Kabupaten Garut secara berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan pada prinsipnya adalah mempertemukan kebutuhan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya. Prinsip-prinsip dasar agar tercapai hasil pembangunan yang optimal dan berkeadilan adalah memenuhi aspek-aspek sebagai berikut :

1. Melibatkan semua pelaku pembangunan;
2. Mengoptimalkan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana dan prasarana;
3. Memaksimalkan penggunaan sumber daya lokal;
4. Mencegah degradasi sumber daya dan penurunan fungsi.

Hasil pembangunan yang diinginkan tersebut akan tercapai dengan optimal apabila ada perencanaan yang baik pada setiap lapis pelaku pembangunan. Sejalan dengan itu untuk mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan setiap tahun nya maka berdasarkan RKPD Tahun 2022 di tentukan Tema Pembangunan Tahun 2022 yaitu **“Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur serta Penguatan Pelayanan Publik Untuk Kesejahteraan Masyarakat”** yang di turunkan ke dalam Program dalam Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut Tahun 2020 sebagai bahan dari perencanaan pembangunan Kabupaten Garut dan penjabaran tahun pertama dari rencana pembangunan jangka menengah, disusun dengan berpedoman kepada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan sebagai bahan penyusunan RKPD Kabupaten Garut.

Untuk mendukung tema pembangunan Kabupaten Garut Tahun 2022 tersebut maka disusun Rencana kerja SKPD yang digunakan dalam mewadahi program dan kegiatan prioritas sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.

## **1.2. Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,



- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 232);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 34);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Dan Inspektorat Kabupaten Garut
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024;
22. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139);
23. Peraturan Bupati Garut Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 38).

### **1.3. Maksud Dan Tujuan**

#### **1.3.1. Maksud**

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik disusun sebagai upaya untuk membuat pedoman dan arahan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan urusan Kesbangpol untuk periode 1 tahun berdasarkan rencana strategis SKPD dan RKPD Kabupaten Garut sehingga dapat memperoleh hasil yang optimal.

#### **1.3.2. Tujuan**

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2022 adalah sebagai dasar untuk mewujudkan program dan kegiatan yang direncanakan selama 1 (satu) tahun anggaran.

Adapun yang menjadi tujuan penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten Garut, sebagai berikut :

1. Terwujudnya penjabaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Garut Tahun 2022
2. Terwujudnya sinkronisasi dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan.
3. Tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif dan berkeadilan serta berkelanjutan.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut Tahun 2022, sebagai berikut :

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Memuat gambaran umum penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

##### **BAB II : HASIL EVALUASI RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN LALU**

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Bakesbangpol, Analisa Kinerja Pelayanan Bakesbangpol, Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bakesbangpol, Review terhadap Rancangan awal RKPD, Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

##### **BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Memuat Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Renja Bakesbangpol, Program dan kegiatan prioritas.

##### **BAB IV : RENCANA KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Memuat Renja SKPD tahun berjalan dan sumber pendanaan perangkat daerah.

##### **BAB V : PENUTUP**

Memuat kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut yang perlu dilaksanakan.

**BAB II**  
**HASIL EVALUASI RENCANA KERJA**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN LALU**

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu**

**2.1.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut pada Tahun 2020 telah melaksanakan 6 (Enam) program terdiri dari 32 Kegiatan prioritas yang tercantum dalam penetapan kinerja. Terhadap masing-masing program utama tersebut akan dianalisis sebagai berikut:

Total anggaran belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.6.502.113.384,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.6.413.596.511,00 atau 98,64%.

**A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Outcome dari program ini adalah Meningkatnya Pelayanan Administrasi dengan dukungan anggaran sebesar Rp.340,631,100,00 dan terealisasi sebesar Rp.318,329,139,00 (93,45%) yang diimplementasikan ke dalam 12 (dua belas) kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, dengan anggaran sebesar Rp.15,000,000,00 dan terealisasi sebesar Rp.8,696,759,00 (57,98%), Output dari kegiatan ini yaitu Meningkatnya operasional pelayanan kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Garut yaitu berupa Jasa Telepon, Air, Listrik, Internet selama 1 (satu) tahun anggaran 2020.
2. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional, dengan anggaran sebesar Rp.12,000,000,00 dan terealisasi sebesar Rp.4,195,900,00 (34,97%) Output kegiatan ini yaitu Meningkatnya operasional pelayanan kantor berupa pembayaran Pajak Kendaraan

Dinas/Operasional sebanyak 11 unit selama 1 (satu) tahun anggaran 2020.

3. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, dengan dukungan anggaran sebesar Rp.26,170,650,00 dan terealisasi sebesar Rp.26,170,650,00 (100%), output dari kegiatan ini adalah Meningkatnya operasional pelayanan kantor berupa Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor selama 1 (satu) tahun anggaran 2020.
4. Kegiatan penyediaan Alat Tulis Kantor, dengan anggaran sebesar Rp.62,424,500,00 dan terealisasi sebesar Rp 62,422,880,00 (100%) output dari kegiatan ini adalah Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kantor berupa penyediaan 40 jenis alat tulis kantor selama 1 (satu) tahun anggaran 2020.
5. Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan, dengan anggaran sebesar Rp.62,433,550,00 dan terealisasi sebesar Rp.62,245,550,00 (99,70%) Output dari kegiatan ini yaitu Meningkatnya operasional pelayanan kantor berupa penyediaan jasa cetak dan penggandaan selama 1 (satu) tahun anggaran 2020.
6. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor, dengan dukungan anggaran sebesar Rp.6,017,500,00 dan terealisasi sebesar Rp.6,017,500,00 (100%), output dari kegiatan ini adalah Meningkatnya operasional pelayanan kantor berupa penyediaan Alat Listrik dan Elektronik selama 1 (satu) tahun anggaran 2020.
7. Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, dengan anggaran sebesar Rp.22,812,000,00 dan terealisasi sebesar Rp.21,912,000,00 (96,05%) output dari kegiatan ini yaitu adalah Meningkatnya operasional pelayanan kantor berupa pengadaan 5 jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor selama tahun anggaran 2020.
8. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan dukungan anggaran sebesar Rp.20,050,500,00 dan terealisasi sebesar Rp 20,050,500,00 (100%), output dari kegiatan ini adalah Meningkatnya operasional pelayanan kantor berupa

pemenuhan alat peralatan rumah tangga kantor Badan Kesbangpol Kabupaten Garut selama 1 (satu) tahun anggaran 2020 sehingga kinerja pegawai meningkat.

9. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan angg.aran sebesar Rp.9,422,400,00. dan terealisasi sebesar Rp.9,422,400,00. (100 %), output dari kegiatan ini adalah operasional pelayanan kantor berupa bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan bagi pegawai Badan Kesbangpol Kabupaten Garut pada tahun anggaran 2020, sehingga 75 % pengetahuan pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut meningkat.
10. Kegiatan penyediaan makanan dan minuman. Kegiatan ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.42.820.000,00 yang terealisasi sebesar Rp.39.420.000,00 (92,06%), Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Meningkatnya operasional pelayanan kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut berupa Jamuan Makan Minum rapat dan Tamu selama 1 (satu) tahun anggaran 2020.
11. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, dengan anggaran sebesar Rp.25,280,000,00 dan terealisasi sebesar Rp.23,940,000,00 (94,70%) output kegiatan ini yaitu kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Meningkatnya Bahan Informasi Kebijakan Pimpinan pada Tahun Anggaran 2020.
12. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Pembinaan ke Dalam Daerah, dengan besar anggaran sebesar Rp 36,200,000,00 dan terealisasi sebesar Rp.33,835,000,00(93,47%) output kegiatan ini yaitu Meningkatnya Bahan Informasi Kebijakan Pimpinan, bentuk kegiatan ini berupa Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan ke Dalam Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran 2020.

#### **B. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

Outcome dari program ini adalah Meningkatnya Disiplin Aparatur dengan dukungan anggaran sebesar Rp.11,100,000,00 dan

terrealisasi sebesar Rp.11,100,000,00 (100%) yang diimplementasikan ke dalam 1 (satu) kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya, dengan alokasi anggaran sebesar 11,100,000,00 dan terrealisasi sebesar Rp.11,100,000,00 (100%). Sasaran dari kegiatan ini adalah meningkatnya disiplin aparatur.

### **C. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

Outcome dari program ini adalah Persentase Sarana dan Prasarana penunjang kerja aparatur dengan kondisi baik sebesar 75 %, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 73,134,000,00 dan terrealisasi sebesar Rp.73,134,000,00 (100%), yang diimplementasikan ke dalam 3 (tiga) kegiatan sebagai berikut:

1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.50,000,000,00 dan terrealisasi sebesar Rp.50,000,000,00 (100 %), Sasaran dari kegiatan ini adalah Meningkatnya operasional Gedung Kantor
2. Kegiatan "Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.17,334,000,00 dan terrealisasi sebesar Rp 17,334,000,00 (100%), Sasaran dari kegiatan ini adalah Meningkatnya operasional pelayanan Kendaraan Dinas.
3. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kerja Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5,800,000,00 dan terrealisasi sebesar Rp.5,800,000,00 (100 %), Sasaran dari kegiatan ini adalah Meningkatnya operasional peralatan kerja kantor.

### **D. Program Bina Ketahanan Bangsa**

Outcome kinerja dari program ini adalah Jumlah pembinaan terhadap masyarakat dalam pemahaman Ketahanan Bangsa dari gangguan ipoleksosbud dengan alokasi anggaran sebesar Rp.339.577.500,00,00 dan terrealisasi sebesar Rp.339.577.500,00 (100%), yang diimplementasikan ke dalam 4 (empat) kegiatan sebagai berikut :



1. Kegiatan Pemantauan dan Penguatan Ketahanan Sosial, Ekonomi dan SDA dalam peningkatan Ketahanan Bangsa.  
Dengan alokasi anggaran sebesar Rp.84,763,000,00 dan terealisasi sebesar Rp.84,763,000 (100%). Sasaran Kegiatan ini adalah Meningkatnya ketahanan sosial, ekonomi dalam Upaya Peningkatan Ketahanan bangsa Kegiatan ini diikuti oleh tokoh masyarakat, pengurus RT/RW dan aparat Desa sebanyak 160 orang yang dilaksanakan pada tanggal 13 dan 14 Oktober 2020, lokasi pelaksanaan kegiatan adalah di Kecamatan Mekarmukti.
2. Kegiatan Verifikasi data base Ormas / LSM  
Dengan alokasi anggaran sebesar Rp.51,200,000,00 dan terealisasi sebesar Rp.51,200,000,00 (100%). Kegiatan ini menghasilkan verifikasi data Ormas.
3. Kegiatan Pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan Ketahanan Bangsa  
Dengan alokasi anggaran sebesar Rp.103,614,500,00,00 dan terealisasi sebesar Rp.103,614,500,00 (100%). Kegiatan ini dilaksanakan dengan menghasilkan wadah koordinasi dan komunikasi organisasi keagamaan dalam organisasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang terdiri dari perwakilan Ormas Keagamaan, hal ini secara efektif mampu meningkatkan kerukunan hidup beragama masyarakat kabupaten Garut, namun dalam pelaksanaan kegiatan ini masih belum optimal mengingat fasilitasi FKUB dilaksanakan melalui kegiatan Rapat koordinasi dan monitoring situasi wilayah terkait kerukunan umat beragama di Kabupaten Garut, Kegiatan Sosialisasi FKUB dengan jumlah peserta sebanyak 180 Orang dilaksanakan pada tanggal 6 Februari 2020 bertempat di Kecamatan Caringin.
4. Kegiatan Fasilitasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat  
Dengan alokasi anggaran sebesar Rp.100,000,000,00 dan terealisasi sebesar Rp.100.000.000,00 (100%). Sasaran kegiatan pemahaman materi pengawasan aliran kepercayaan masyarakat, dengan peserta Aparat Desa dan Tokoh Masyarakat sebanyak 225 Orang lokasi kegiatan tanggal 16 Desember 2020 di

Kecamatan Sukawening, tanggal 17 Desember 2020 di Kecamatan Banjarwangi dan tanggal 22 Desember 2020 di Kecamatan Caringin.

#### **E. Program Bina Politik Dalam Negeri**

Outcome kinerja dari program ini adalah Jumlah Pembinaan Terhadap Masyarakat Dalam Pemahaman Pengembangan Wawasan Kebangsaan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 479,668,500,00 dan terealisasi sebesar Rp.479,668,500,00 (99,98%), yang diimplementasikan ke dalam 5 (lima) kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.155,631,500,00,00 dan terelalisasi sebesar Rp.155,631,500,00 (100%). Sasaran dari kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman politik masyarakat; peserta terdiri dari Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda dan Tokoh Agama sebanyak 444 orang yang dilaksanakan di 3 Kecamatan di Wilayah Kabupaten Garut sebagai berikut :

No	Nama Kecamatan	Tgl Pelaksanaan	Jml Peserta
1	Cibatu	27 Januari 2020	148 orang
2	Mekarmukti	18 Februari 2020	148 orang
3	Caringin	10 Maret 2020	148 orang

2. Kegiatan Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.45,000,000,00,00 dan terelalisasi sebesar Rp.45,000,000,00 (100%). Kegiatan ini dilaksanakan untuk dana pembinaan bagi 9 (sembilan) Partai Politik yaitu :
  - a. Partai DEMOKRAT,
  - b. Partai HANURA,
  - c. Partai PDIP,
  - d. Partai PKS,
  - e. Partai PKB,
  - f. Partai PPP,
  - g. Partai GOLKAR,

- h. Partai GERINDRA,
- i. Partai PAN.

Kegiatan ini menghasilkan penguatan fungsi partai politik serta Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan bantuan keuangan parpol yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Garut.

3. Kegiatan Peningkatan Pemahaman Nilai-nilai Kebangsaan bagi Masyarakat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.52,900,000,00,00 dan terelalisasi sebesar Rp.52,900,000,00 (100%). Sasaran dari kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman nilai-nilai Kebangsaan Bagi Masyarakat; peserta terdiri dari Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda dan Tokoh Agama sebanyak 62 orang yang dilaksanakan pada tanggal 6 November 2020 di Kecamatan Bungbulang.
4. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Bela Negara, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.175,631,500,00,00 dan terelalisasi sebesar Rp.175,631,500,00 (100%). Sasaran dari kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman Masyarakat terhadap Kapasitas Bela Nega; peserta terdiri dari Tokoh Masyarakat dan Pelajar sebanyak 592 orang yang dilaksanakan di 4 Kecamatan di Wilayah Kabupaten Garut sebagai berikut:

No	Lokasi	Tgl Pelaksanaan	Jml Peserta
1	SMK Negeri 4 Kecamatan Karangpawitan	29 Januari 2020	148 orang
2	Kecamatan Kersamanah	19 Februari 2020	148 orang
3	Kecamatan Selaawi	9 Maret 2020	148 orang
4	SMKN 19 Garut Kecamatan Bayongbong	11 Maret 2020	148 orang
5	Aula Kesbangpol	19 Desember 2020	100 orang

5. Kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.50,505,500,00,00 dan terelalisasi sebesar Rp.50,505,500,00 (100%). Kegiatan ini berupaya untuk menciptakan harmonisasi antar etnis di Kabupaten Garut, serta untuk meminimalisir terjadinya konflik antar suku. Proses pembauran dikalangan masyarakat di Kabupaten Garut dirasakan sangat penting mengingat dinamika serta kondisi

sosia-kultural yang majemuk. melalui wadah koordinasi dan komunikasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), diharapkan mampu menciptakan kehidupan masyarakat yang rukun serta harmonis. Kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan di Kabupaten Garut tahun 2020 ini dilaksanakan dan difokuskan pada pelaksanaan Rapat-rapat serta Pembinaan peningkatan wawasan kebangsaan; Kegiatan FPK dilaksanakan dalam 4 angkatan yaitu pada tanggal 26 Juni 2020, 24 Juli 2020, 11 Agustus 2020 dan pada tanggal 10 September 2020 dengan jumlah peserta sebanyak 120 orang bertempat di Aula Bakesbangpol Kabupaten Garut.

#### **F. Program Kewaspadaan Dini daerah**

Outcome kinerja dari program ini adalah terselenggaranya Kewaspadaan Dini Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2,032,139.050,00 dan terealisasi sebesar Rp.2,019,696,550,00 (99,39%), yang diimplementasi-kan ke dalam 7 (tujuh) kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pemantauan Dan Pengawasan Aktivitas Orang Asing, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.103.895.800,00,00 dan terealisasi sebesar Rp.103.895.800,00,00 (100%). Sasaran dari kegiatan ini adalah Meningkatkan akurasi data Orang Asing di kabupaten Garut, Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk Pemantauan dan koordinasi dengan unsur muspika. Jumlah Personil pengamanan yang menangani potensi konflik pada kegiatan ini adalah 14.256 orang. Dalam kegiatan ini selain melaksanakan rapat koordinasi juga melaksanakan sosialisasi dalam rangka menjaga stabilitas keamanan di Kabupaten Garut. Adapun kegiatan rapat koordinasi dilaksanakan rutin setiap bulan (12 Kali) bertempat di Ruang Rapat Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut yang di hadiri oleh Tim, dan kegiatan Sosialisasi di Kawasan rawan konflik
2. Kegiatan Pencegahan Dan Penanggulangan Konflik (DID), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.127.805.200,00,00 dan terealisasi

sebesar Rp 127.805.200,00 (100%). Outcome kinerja dari program ini adalah Jumlah kerjasama dalam penanganan gangguan keamanan dan ketertiban di Kabupaten Garut. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk Rapat Tim, Pembinaan dan Monitoring di 42 Kecamatan yang diidentifikasi daerah rawan konflik. Sasaran dari Kegiatan ini adalah Meningkatkan Intensitas penanganan konflik di kabupaten Garut. Adapun jumlah konflik yang tercatat di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut tahun 2020 sebanyak 7 Kasus sebagai berikut :

- a. Konflik Sosial sebanyak 3 Kasus
  - b. Konflik Ideologi sebanyak 3 Kasus
  - c. Konflik Ekonomi sebanyak 1 Kasus
3. Kegiatan Tim Kordinasi Mitra Bakesbangpol Dalam Penanganan Gangguan Keamanan Di Daerah (DID), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.353.988.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 348.503.000,00 (98,45%). Outcome kinerja dari program ini adalah Jumlah kerjasama dalam penanganan gangguan keamanan dan ketertiban di Kabupaten Garut. Jumlah Personil pengamanan yang menangani potensi konflik pada kegiatan ini adalah 14.256 orang. Dalam kegiatan ini selain melaksanakan rapat koordinasi juga melaksanakan sosialisasi dalam rangka menjaga stabilitas keamanan di Kabupaten Garut. Adapun kegiatan rapat koordinasi dilaksanakan rutin setiap bulan (12 Kali) bertempat di Ruang Rapat Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut yang di hadiri oleh Tim, dan kegiatan Sosialisasi di Kawasan rawan konflik
  4. Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.26.550.000,00,00 dan terealisasi sebesar Rp 19.850.000,00,00 (74,76%). Kegiatan Outcome kinerja dari program ini adalah Jumlah kerjasama dalam penanganan gangguan keamanan dan ketertiban di Kabupaten Garut,
  5. Kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.47.350.000,00 dan terealisasi sebesar Rp

47.350.000,00 (100%). Outcome kinerja dari program ini adalah Jumlah kerjasama dalam penanganan gangguan keamanan dan ketertiban di Kabupaten Garut, Kegiatan ini meningkatkan peran masyarakat melalui wadah koordinasi dan komunikasi yaitu Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat. Kegiatan FKDM ini dilaksanakan dalam bentuk rapat Tim FKDM kabupaten Garut dan sosialisasi kepada masyarakat Kabupaten Garut, Pelaksanaan Rapat Tim FKDM sebanyak 12 kali (setiap bulan) dilaksanakan di Ruang Rapat Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut dan melaksanakan sosialisasi bertempat di Gedung KORPRI Kabupaten Garut pada tanggal 12 Februari 2020 dengan jumlah peserta 37 orang.

6. Kegiatan Pengamanan Unjuk Rasa Dalam Rangka Kondusifitas Daerah, Dengan Alokasi Anggaran Sebesar Rp.372.550.050,00 Dan Terealisasi Sebesar Rp.372.550.050,00 (100%). Outcome Kinerja Dari Program Ini Adalah Jumlah Kerjasama Dalam Penanganan Gangguan Keamanan Dan Ketertiban Di Kabupaten Garut,
7. Kegiatan Pengamanan Hari-Hari Besar Dalam Rangka Ketertiban Dan Keamanan Masyarakat (DID), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.999.742.500,00 (99,97%). Sasaran dari Kegiatan ini adalah Meningkatnya Intensitas penanganan konflik pada Hari-hari Besar (Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru) di Wilayah Kabupaten Garut. Pengamanan dilaksanakan pada Tanggal 15 dan 16 Juni 2020 (Hari Raya Idul Fitri), Tanggal 25 Desember 2020 (Hari Natal), dan pada Tanggal 31 Desember 2020 (Tahun Baru 2021), dengan Jumlah Personil pengamanan yang menangani potensi konflik pada kegiatan ini adalah 9836 orang.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut pada Tahun 2021 telah melaksanakan 6 (Enam) program terdiri dari 11 Kegiatan dan 23 Sub Kegiatan prioritas yang tercantum dalam penetapan kinerja. Terhadap masing-masing program utama tersebut akan dianalisis sebagai berikut:

Total anggaran belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 14.493.774.852,00 dan sampai Triwulan II 2021 dapat direalisasikan sebesar Rp. 8.749.953.782,00 atau 60,37%.

#### **A. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan**

Outcome kinerja dari program ini adalah Persentase Peningkatan Pemahaman Ideologi Pancasila, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 338,405,100,00 dengan capaian Target (90%) dan sampai Triwulan II 2021 dapat direalisasikan sebesar Rp. 202.584.000,00 atau 59,86%., yang diimplementasikan ke dalam Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
  - a) Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka TunggalIka dan Sejarah Kebangsaan

#### **B. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik**

Outcome kinerja dari program ini adalah Persentase Pemahaman Politik Masyarakat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.090.561.200,00 dengan capaian Target (72%) dan sampai Triwulan II 2021 dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.986.340.700,00 atau 95,01%., yang diimplementasikan ke dalam Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,

Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.

- a) Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah.
- b) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah.

### **C. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya**

Outcome kinerja dari program ini adalah Persentase Pembinaan ketahanan ekososbud yang terfasilitasi, Jumlah Tokoh Masyarakat / Tokoh Agama yang memahami kerukunan umatberagama Jumlah Tokoh Masyarakat yang memahami terhadap materi P4GN, Terbitnya Perda P4GN dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 454.593.250,00 dengan capaian Target (80%) dan sampai Triwulan II 2021 dapat direalisasikan sebesar Rp. 183.004.600,00 atau 40,25%., yang diimplementasikan ke dalam Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.
  - a) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

### **D. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**

Outcome kinerja dari program ini adalah Persentase Ormas Aktif, Jumlah Ormas yang terverifikasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp.



1.943.467.200,00 dengan capaian Target (90%) dan sampai Triwulan II 2021 dapat direalisasikan sebesar Rp. 194.210.200,00 atau 9,99%., yang diimplementasikan ke dalam Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.
  - a) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.

#### **E. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial**

Outcome kinerja dari program ini adalah Persentase Penurunan Konflik Sosial, Jumlah FKDM yang pengurusnya memahami terhadap materi pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Jumlah Personil Pengamanan Yang Menangani Konflik Pada Penyelenggaraan Pilkades Jumlah Peserta Kegiatan Pe pengawasan Orang Asing (POA) Jumlah Peserta Pelaksanaan Koordinasi Pencegahan dan Penanggulangan Konflik Jumlah peserta Pelatihan Sosialisasi dan Pembinaan yang memahami Tentang materi Sisitem Informasi Intelijen Jumlah Personil Pengamanan Yang Menangani Konflik Pada Kegiatan Unjukrasa dan Pengamanan Rutin di Kab.Garut Jumlah Peserta Pelatihan/Sosialisasi dan Rapat Tim Kegiatan Mitra Bakesbangpol dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.507.818.200,00 dengan capaian Target (100%) dan sampai Triwulan II 2021 dapat direalisasikan sebesar Rp. 2.476.709.700,00 atau 44,96%., yang diimplementasikan ke dalam Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.
  - a) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan

Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

- b) Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

#### **F. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Outcome kinerja dari program ini adalah Persentase pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.158.929.902,00 dengan capaian Target (100%) dan sampai Triwulan II 2021 dapat direalisasikan sebesar Rp. 2.842.726.082,00 atau 68,35%, yang diimplementasikan ke dalam Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - a) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - a) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - b) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - a) Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - a) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - b) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - c) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  - d) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

- e) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - f) Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
  - g) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - c) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

### **2.1.2 Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu**

Dokumen Renja pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan SKPD. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD. Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, proses penyusunan Renja terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja SKPD.

Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim, penyusunan agenda kerja, serta persiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja pencapaian Renstra SKPD. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja SKPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala SKPD menetapkan Renja untuk menjadi pedoman di lingkungan SKPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas SKPD pada tahun anggaran berkenaan

Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut Tahun 2022 ini memuat kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan langsung oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut dalam rangka pencapaian tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut, seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut Tahun 2019–2024 yaitu:

**“Meningkatnya Kualitas Bina Karakter Bangsa”**

Untuk pencapaian tujuan tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten Garut menetapkan 3 (tiga) sasaran, yaitu:

1. Terwujudnya Kebebasan Sipil;
2. Terwujudnya Hak-hak Politik Masyarakat;
3. Meningkatkan Kapasitas Bakesbangpol.

Ke-3 sasaran diatas perlu ditempuh melalui proses manajemen yang baik supaya terciptanya sinergitas antara Perencanaan Daerah, Provinsi dan Pusat, sehingga akan mempermudah pengembangan “*sharing*” pembiayaan dengan pemerintah pusat dan provinsi untuk program-program yang akan dilakukan. Rencana kerja berguna sebagai rujukan dalam penyusunan LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggung

Jawaban), dan tolak ukur penilaian kinerja Badan Kesbangpol Kabupaten Garut.

Pencapaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut sampai dengan tahun 2022 di sajikan pada tabel pada halaman berikut ini :

**Tabel 2.2**  
**Capaian Renstra**  
**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun			Realisasi Capaian Tahun		
					2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	Jumlah pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	-	-		150 Tomas dan 14 Ormas/ LSM	150 Tomas dan 14 Ormas/ LSM	150 Tomas dan 14 Ormas/ LSM	240 Orang dan 14 Ormas/Lsm		
2	Jumlah pembinaan terhadap masyarakat dalam dalam pemahaman pengembangan wawasan kebangsaan	-	-		1260 Orang	1360 Orang	1360 Orang	1200 Orang		
3	Jumlah fasilitasi kerjasama penanganan gangguan keamanan dan ketertiban	-	3215		31800 Orang	31800 Orang	31800 Orang	28282 Orang		
4	Prosentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu	-	3,199		n/a	70%	n/a	n/a		

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tahun 2021 adalah tahun kedua dari implementasi Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut Tahun 2019-2024. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, pencapaian sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut pada Tahun 2021 secara keseluruhan disajikan pada Tabel berikut ini :

### Sasaran 1 : Terwujudnya Kebebasan Sipil

No	Indikator Kinerja	Hasil Tahun 2020	Hasil Tahun 2021	Target Tahun 2021	Tercapai / Tidak	Hasil sampai dengan 2021	Target Akhir Renstra

1	Persentase Peningkatan Pemahaman Ideologi Pancasila	100%		90%	√		90%
2	Persentase Pembinaan ketahanan ekososbud yang terfasilitasi	100%		90%	√		90%
3	Persentase Ormas Aktif	100%		90%	√		90%

**Sumber :** Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, √ = mencapai target, X = tidak mencapai target, Δ = tidak mencapai target tetapi ada peningkatan

**Deskripsi penjelasan pencapaian sasaran 1 :**

Pada tahun 2021, Hasil dari Indikator Persentase Peningkatan Pemahaman Ideologi Pancasila adalah sebesar \*) dari target 90%, Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2020 maka pencapaian indikator Persentase Peningkatan Pemahaman Ideologi Pancasila adalah tetap.

Pada tahun 2021, Hasil dari Indikator Persentase Pembinaan ketahanan ekososbud yang terfasilitasi adalah sebesar \*) dari target 90%, Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2020 maka pencapaian indikator Persentase Pembinaan ketahanan ekososbud yang terfasilitasi adalah tetap.

Pada tahun 2021, Hasil dari Indikator Persentase Ormas Aktif adalah sebesar \*) dari target 90%, Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2020 maka pencapaian indikator Persentase Ormas Aktif adalah tetap.

**Sasaran 2 : Terwujudnya Hak-hak Politik Masyarakat**

No	Indikator Kinerja	Hasil Tahun 2020	Hasil Tahun 2021	Target Tahun 2021	Tercapai / Tidak	Hasil sampai dengan 2021	Target Akhir Renstra
1	Persentase Pemahaman Politik Masyarakat	99,98%		72%	√		72%

2	Persentase Penurunan Konflik Sosial	99,39%		100%	√		100%
---	-------------------------------------	--------	--	------	---	--	------

**Sumber :** Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, √ = mencapai target, X = tidak mencapai target, Δ = tidak mencapai target tetapi ada peningkatan.

**Deskripsi penjelasan pencapaian sasaran 2 :**

Pada tahun 2021, Hasil dari Indikator Persentase Pemahaman Politik Masyarakat adalah sebesar \*) dari target 72%, Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2020 maka pencapaian indikator Persentase Pemahaman Politik Masyarakat adalah tetap.

Pada tahun 2021, Hasil dari Indikator Persentase Penurunan Konflik Sosial adalah sebesar \*) dari target 100%, Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2020 maka pencapaian indikator Persentase Penurunan Konflik Sosial adalah tetap.

**Sasaran 3 : Meningkatkan Kapasitas Bakesbangpol**

No	Indikator Kinerja	Hasil Tahun 2020	Hasil Tahun 2021	Target Tahun 2021	Tercapai / Tidak	Hasil sampai dengan 2021	Target Akhir Renstra
1	Persentase pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	97,81%		100%	√		100%

**Sumber :** Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, √ = mencapai target, X = tidak mencapai target, Δ = tidak mencapai target tetapi ada peningkatan.

**Deskripsi penjelasan pencapaian sasaran 3 :**

Pada tahun 2021, Hasil dari Indikator Persentase pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-

undangan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebesar \*) dari target 100%, Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2020 maka pencapaian indikator Persentase pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah tetap.

### **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi**

Isu-Isu strategis yang dihadapi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut adalah :

1. Masuknya Era Globalisasi yang berpengaruh pada tatanan kehidupan masyarakat.
2. Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan kehidupan demokrasi terutama dalam hal penyampaian aspirasi seringkali menjurus pemaksaan kehendak, hal ini dapat menjadi potensi terjadinya konflik dan gejolak sosial.
3. Budaya politik yang dilandasi oleh moral dan etika politik masih perlu dimantapkan, sehubungan dengan adanya kecenderungan merosotnya moral dan etika dalam artikulasi politik baik di tingkat elite maupun massa, diwarnai dengan peningkatan perilaku agresif pada masyarakat, berupa penyampaian tuntutan dengan tuntutan dengan penggalangan massa, perusakan, main hakim sendiri dan kecenderungan meningkatnya pelanggaran terhadap tatanan kehidupan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Kebebasan yang dinamik melalui momentum reformasi seakan berjalan tanpa arah, karenanya perlu di dayagunakan menjadi sumber daya kreatifitas dan sumber daya cipta yang positif, agar tetap mendukung eksistensi negara kesatuan yang demokratis dan bermuara pada tegaknya kedaulatan rakyat yang berkeadilan dan beradab



**Berdasarkan Isu-Isu penting tersebut diatas, masalah mendesak Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut adalah :**

1. Pemeliharaan stabilitas kehidupan sosial politik yang dinamis dalam mendorong partisipasi dan kehidupan demokrasi di daerah dengan membuka komunikasi dan integrasi sosial politik baik vertikal maupun horizontal dengan semua elemen masyarakat.
2. Peningkatan kebersamaan, persatuan dan kesatuan bangsa sebagai kesatuan pikir dan tindak bagi seluruh komponen pembangunan di Kabupaten Garut
3. Perlunya pendataan dan pembinaan LSM, Ormas, Organisasi Politik serta Organisasi Masyarakat lainnya, dalam rangka pembinaan dan pemantapan wawasan kebangsaan serta menciptakan hubungan yang harmonis antar lembaga.

#### **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rencana Kerja (Renja) tahun 2022 merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan setiap tahunnya. Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 yang disusun ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya yang merupakan tolak ukur keberhasilan dari tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut. Disamping itu juga, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 yang disusun ini memuat informasi tentang program, kegiatan, indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen Rencana Kerja (Renja) ini akan diketahui keterkaitan antara tujuan dengan sasaran, strategi dengan kebijakan serta keterkaitan antara program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut. Program dan kegiatan Tahun 2022 yang telah diusulkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut merupakan rancangan awal

Rencana Kerja (Renja) yang akan dilaksanakan Tahun 2021 dan telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 seperti ditunjukkan pada Tabel 2.2 berikut.

**Tabel 2.3**  
**Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022**

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8		<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>					<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>					
	8.01.	<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>					<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>					
	8.01.01.	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>PERSENTASE PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA SKPD DAN PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN YANG TEPAT WAKTU DAN SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>	KAB GARUT	100%	5.580.881.705	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>PERSENTASE PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA SKPD DAN PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN YANG TEPAT WAKTU DAN SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>	KAB GARUT	100%	5.580.881.705	Bakesbang pol
	8.01.01.201	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan SKPD	KAB GARUT	100%	146.000.000	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan SKPD	KAB GARUT	100%	146.000.000	Bakesbang pol
	8.01.01.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan dokumen perencanaan SKPD	KAB GARUT	8 Dokumen	26.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan dokumen perencanaan SKPD	KAB GARUT	8 Dokumen	26.000.000	Bakesbang pol
	8.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Survey Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan	KAB GARUT	8 Dokumen	120.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Survey Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan	KAB GARUT	8 Dokumen	120.000.000	Bakesbang pol
	8.01.01.02.01	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan dokumen keuangan SKPD</b>	KAB GARUT	100%	4.018.150.000	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan dokumen keuangan SKPD</b>	KAB GARUT	100%	4.018.150.000	Bakesbang pol
	8.01.01.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	KAB GARUT	35 Orang	4.000.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	KAB GARUT	35 Orang	4.000.000.000	Bakesbang pol
	8.01.01.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD	KAB GARUT	1 Dokumen	18.150.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD	KAB GARUT	1 Dokumen	18.150.000	Bakesbang pol
	8.01.01.205	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Disiplin ASN dan kesesuaian kompetensi di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</b>	KAB GARUT	100%	12.353.800	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Disiplin ASN dan kesesuaian kompetensi di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</b>	KAB GARUT	100%	12.353.800	Bakesbang pol
	8.01.01.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian seragam dinas pegawai beserta atribut kelengkapannya	KAB GARUT	38 Stell	12.353.800	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian seragam dinas pegawai beserta atribut kelengkapannya	KAB GARUT	38 Stell	12.353.800	Bakesbang pol
	8.01.01.206	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	KAB GARUT	100%	509.000.000	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	KAB GARUT	100%	509.000.000	Bakesbang pol
	8.01.01.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tambahan jumlah komponen instalasi listrik	KAB GARUT	10 Jenis	9.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tambahan jumlah komponen instalasi listrik	KAB GARUT	10 Jenis	9.000.000	Bakesbang pol

8.01.01.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	KAB GARU T	46 Jenis	150.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	KAB GARU T	46 Jenis	150.000.000	Bakesbang pol
8.01.01.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga	KAB GARU T	27 Jenis	15.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga	KAB GARU T	27 Jenis	15.000.000	Bakesbang pol
8.01.01.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	KAB GARU T	18 Jenis	125.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	KAB GARU T	18 Jenis	125.000.000	Bakesbang pol
8.01.01.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	KAB GARU T	3 Jenis	10.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	KAB GARU T	3 Jenis	10.000.000	Bakesbang pol
8.01.01.06.08.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitasi kunjungan tamu	KAB GARU T	3300 Orang	100.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitasi kunjungan tamu	KAB GARU T	3300 Orang	100.000.000	Bakesbang pol
8.01.01.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pegawai yang mengikuti pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	KAB GARU T	12 Bulan	100.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pegawai yang mengikuti pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	KAB GARU T	12 Bulan	100.000.000	Bakesbang pol
<b>8.01.01.207</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	KAB GARU T	100%	<b>600.000.000</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	KAB GARU T	100%	<b>600.000.000</b>	Bakesbang pol
8.01.01.207.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas operasional	KAB GARU T	5 Jenis	500.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas operasional	KAB GARU T	5 Jenis	500.000.000	Bakesbang pol
8.01.01.207.05	Pengadaan Mebel	Jumlah tambahan pengadaan mebel	KAB GARU T	2 Jenis	100.000.000	Pengadaan Mebel	Jumlah tambahan pengadaan mebel	KAB GARU T	2 Jenis	100.000.000	Bakesbang pol
<b>8.01.01.208</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	KAB GARU T	100%	<b>52.197.905</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	KAB GARU T	100%	<b>52.197.905</b>	Bakesbang pol
8.01.01.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	KAB GARU T	1170 Buah	6.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	KAB GARU T	1170 Buah	6.000.000	Bakesbang pol
8.01.01.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran rekening telepon dan air	KAB GARU T	12 Bulan	19.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran rekening telepon dan air	KAB GARU T	12 Bulan	19.000.000	Bakesbang pol
8.01.01.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan jasa/alat kebersihan kantor	KAB GARU T	12 Bulan	27.197.905	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan jasa/alat kebersihan kantor	KAB GARU T	12 Bulan	27.197.905	Bakesbang pol
<b>8.01.01.209</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</b>	KAB GARU T	100%	<b>243.180.000</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</b>	KAB GARU T	100%	<b>243.180.000</b>	Bakesbang pol
8.01.01.09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	KAB GARU T	40 Jenis	30.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	KAB GARU T	40 Jenis	30.000.000	Bakesbang pol
8.01.01.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	KAB GARU T	6 Jenis	13.180.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	KAB GARU T	6 Jenis	13.180.000	Bakesbang pol
8.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terciptanya bangunan gedung yang representatif	KAB GARU T	1 Gedung	200.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terciptanya bangunan gedung yang representatif	KAB GARU T	1 Gedung	200.000.000	Bakesbang pol
<b>8.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>	<b>PERSENTASE PENINGKATAN PEMAHAMAN IDEOLOGI PANCASILA</b>	KAB GARU T	90%	<b>1.500.000.000</b>	<b>PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>	<b>PERSENTASE PENINGKATAN PEMAHAMAN IDEOLOGI PANCASILA</b>	KAB GARU T	90%	<b>1.500.000.000</b>	Bakesbang pol
<b>8.01.02.201</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan</b>	<b>Persentase Sosialisasi</b>	KAB	90%	<b>1.500.000.000</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan</b>	<b>Persentase Sosialisasi</b>	KAB	90%	<b>1.500.000.000</b>	Bakesbang

		<b>Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan yang Terfasilitasi, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</b>	GARU T			<b>Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan yang Terfasilitasi, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</b>	GARU T			pol
8.01.02.01.04.		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	-Jumlah pelaksanaan koordinasi wawasan kebangsaan-Jumlah pelaksanaan koordinasi karakter bangsa-Jumlah pelaksanaan koordinasi bela negara-Jumlah pelaksanaan kebijakan pembauran kebangsaan-Jumlah pelaksanaan koordinasi wawasan kebangsaan yang dirumuskan	KAB GARU T	800 Orang	1.500.000.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	-Jumlah pelaksanaan koordinasi wawasan kebangsaan-Jumlah pelaksanaan koordinasi karakter bangsa-Jumlah pelaksanaan koordinasi bela negara-Jumlah pelaksanaan kebijakan pembauran kebangsaan-Jumlah pelaksanaan koordinasi wawasan kebangsaan yang dirumuskan	KAB GARU T	800 Orang	1.500.000.000	Bakesbang pol
8.01.03		<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>	<b>PERSENTASE PEMAHAMAN POLITIK MASYARAKAT</b>	KAB GARU T	72%	8.250.000.000	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>	<b>PERSENTASE PEMAHAMAN POLITIK MASYARAKAT</b>	KAB GARU T	72%	8.250.000.000	Bakesbang pol
8.01.03.201		<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</b>	<b>Persentase Sosialisasi Pendidikan Politik, Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilu, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</b>	KAB GARU T	72%	8.250.000.000	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</b>	<b>Persentase Sosialisasi Pendidikan Politik, Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilu, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</b>	KAB GARU T	72%	8.250.000.000	Bakesbang pol
8.01.03.01.02.		Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	-Jumlah penyusunan bahan perumusan kebijakan sosialisasi pendidikan politik -Jumlah penyusunan bahan perumusan kebijakan partisipasi politik masyarakat dalam pemilu -Jumlah penyusunan bahan perumusan kebijakan fasilitas kelembagaan pemerintahan -Jumlah penyusunan bahan perumusan kebijakan pemantauan situasi politik daerah	KAB GARU T	1 Dokumen	150.000.000	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	-Jumlah penyusunan bahan perumusan kebijakan sosialisasi pendidikan politik -Jumlah penyusunan bahan perumusan kebijakan partisipasi politik masyarakat dalam pemilu -Jumlah penyusunan bahan perumusan kebijakan fasilitas kelembagaan pemerintahan -Jumlah penyusunan bahan perumusan kebijakan pemantauan situasi politik daerah	KAB GARU T	1 Dokumen	150.000.000	Bakesbang pol
8.01.03.01.03.		Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	-Jumlah pelaksana kebijakan sosialisasi pendidikan politik-Jumlah pelaksana kebijakan partisipasi politik masyarakat dalam pemilu-Jumlah pelaksana kebijakan fasilitas kelembagaan pemerintahan-Jumlah	KAB GARU T	9 Parpol / 124 Orang	8.100.000.000	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	-Jumlah pelaksana kebijakan sosialisasi pendidikan politik-Jumlah pelaksana kebijakan partisipasi politik masyarakat dalam pemilu-Jumlah pelaksana kebijakan fasilitas kelembagaan pemerintahan-Jumlah pelaksana kebijakan pemantauan situasi politik daerah-Jumlah pelaksana	KAB GARU T	9 Parpol / 124 Orang	8.100.000.000	Bakesbang pol

			pelaksana kebijakan pemantauan situasi politik daerah-Jumlah pelaksana kebijakan belanja hibah kepada partai politik					kebijakan belanja hibah kepada partai politik				
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	PERSENTASE ORMAS AKTIF	KAB GARU T	90%	2.500.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	PERSENTASE ORMAS AKTIF	KAB GARU T	90%	2.500.000.000	Bakesbang pol	
8.01.04.201	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas asing di daerah	KAB GARU T	90%	2.500.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas asing di daerah	KAB GARU T	90%	2.500.000.000	Bakesbang pol	
8.01.04.01.03.	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	-Jumlah Ormas yang terverifikasi -Jumlah pelaksanaan kebijakan pemberdayaan ormas -Jumlah pelaksanaan kebijakan evaluasi dan mediasi sengketa ormas -Jumlah pelaksanaan kebijakan pengawasan ormas -Jumlah pelaksanaan kebijakan ormas asing di daerah -Jumlah pelaksanaan kebijakan Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	KAB GARU T	75 Ormas/LS M	2.500.000.000	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	-Jumlah Ormas yang terverifikasi -Jumlah pelaksanaan kebijakan pemberdayaan ormas -Jumlah pelaksanaan kebijakan evaluasi dan mediasi sengketa ormas -Jumlah pelaksanaan kebijakan pengawasan ormas -Jumlah pelaksanaan kebijakan ormas asing di daerah -Jumlah pelaksanaan kebijakan Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	KAB GARU T	75 Ormas/LS M	2.500.000.000	Bakesbang pol	
8.01.05.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	PERSENTASE PEMBINAAN KETAHANAN EKOSOSBUD YANG TERFASILITASI	KAB GARU T	90%	500.000.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	PERSENTASE PEMBINAAN KETAHANAN EKOSOSBUD YANG TERFASILITASI	KAB GARU T	90%	500.000.000	Bakesbang pol	
8.01.05.201	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Sosialisasi ketahanan ekososbud, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama, penghayat kepercayaan di daerah	KAB GARU T	90%	500.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Sosialisasi ketahanan ekososbud, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama, penghayat kepercayaan di daerah	KAB GARU T	90%	500.000.000	Bakesbang pol	
8.01.04.01.03.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	-Jumlah pelaksana kebijakan sosialisasi ketahanan ekososbud yang tersusun -Jumlah pelaksana kebijakan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika yang tersusun -Jumlah pelaksana kebijakan fasilitasi kerukunan umat beragama tersusun -Jumlah pelaksana kebijakan penghayat kepercayaan di daerah yang tersusun	KAB GARU T	290 Orang	500.000.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	-Jumlah pelaksana kebijakan sosialisasi ketahanan ekososbud yang tersusun -Jumlah pelaksana kebijakan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika yang tersusun -Jumlah pelaksana kebijakan fasilitasi kerukunan umat beragama tersusun -Jumlah pelaksana kebijakan penghayat kepercayaan di daerah yang tersusun	KAB GARU T	290 Orang	500.000.000	Bakesbang pol	

			kepercayaan di daerah yang tersusun										
	8.01.06	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	<b>PERSENTASE PENURUNAN KONFLIK SOSIAL</b>	KAB GARU T	100%	7.500.000.000	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	<b>PERSENTASE PENURUNAN KONFLIK SOSIAL</b>	KAB GARU T	100%	7.500.000.000	Bakesbang pol	
	8.01.06.201	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>	Persentase kewaspadaan dini yang terfasilitasi, Kerjasama inteljen, Pemantauan Orang Asing, Pemantauan Tenaga Kerja Asing, Pemantauan Lembaga Asing, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Penanganan konflik daerah	KAB GARU T	100%	7.500.000.000	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>	Persentase kewaspadaan dini yang terfasilitasi, Kerjasama inteljen, Pemantauan Orang Asing, Pemantauan Tenaga Kerja Asing, Pemantauan Lembaga Asing, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Penanganan konflik daerah	KAB GARU T	100%	7.500.000.000	Bakesbang pol	
	8.01.06.01.03.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Inteljen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	-Jumlah kebijakan kewaspadaan dini yang terlaksana-Jumlah program kerja kerjasama inteljen yang terlaksana-Jumlah program kerja pemantauan orang asing tersusun-Jumlah program kerja pemantauan tenaga kerja asing yang terlaksana-Jumlah program kerja pemantauan lembaga asing yang terlaksana-Jumlah program kerja fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan yang terlaksana-Jumlah program kerja penanganan konflik daerah yang terlaksana	KAB GARU T	6636 Orang	6.000.000.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Inteljen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	-Jumlah kebijakan kewaspadaan dini yang terlaksana-Jumlah program kerja pemantauan orang asing tersusun-Jumlah program kerja pemantauan tenaga kerja asing yang terlaksana-Jumlah program kerja pemantauan lembaga asing yang terlaksana-Jumlah program kerja fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan yang terlaksana-Jumlah program kerja penanganan konflik daerah yang terlaksana	KAB GARU T	6636 Orang	6.000.000.000	Bakesbang pol	
	8.01.06.01.04.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Inteljen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	-Jumlah Koordinasi kewaspadaan dini -Jumlah Koordinasi kerjasama inteljen -Jumlah Koordinasi pemantauan orang asing tersusun -Jumlah Koordinasi pemantauan tenaga kerja asing -Jumlah Koordinasi fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan -Jumlah Koordinasi fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan -Jumlah Koordinasi penanganan konflik daerah	KAB GARU T	32982 Orang	1.500.000.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Inteljen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	-Jumlah Koordinasi kewaspadaan dini -Jumlah Koordinasi kerjasama inteljen -Jumlah Koordinasi pemantauan orang asing tersusun -Jumlah Koordinasi pemantauan tenaga kerja asing -Jumlah Koordinasi fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan -Jumlah Koordinasi fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan -Jumlah Koordinasi penanganan konflik daerah	KAB GARU T	32982 Orang	1.500.000.000	Bakesbang pol	
<b>JUMLAH TOTAL</b>						<b>25.830.881.705</b>					<b>25.830.881.705</b>		

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat berdasarkan hasil penelitian lapangan dan pengamatan berdasarkan hasil pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Garut khususnya Musrenbang Tingkat Kecamatan, bahwa terdapat 23 usulan dan 1 pokir dari para pemangku kepentingan yang ditujukan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut sebagaimana Tabel 2.3 berikut.

**Tabel 2.3**  
**Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2022**

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN
1	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Kecamatan Selaawi	Pembinaan Politik	10 Orang	
2	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Kecamatan Caringin	Pembinaan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya	5 Kelompok	
3	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Kecamatan Wanaraja	Pembinaan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya	5 Orang	
4	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Kecamatan Leuwigoong	Pembinaan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya	11 Orang	
5	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Kecamatan Peundeuy	Pembinaan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya	5 Orang	
6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Kecamatan Karangpawitan	Pembinaan FKDM (Forum kewaspadaan Dini Daerah)	15 Orang	
7	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Kecamatan Tarogong Kidul	Pembinaan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya	5 Orang	
8	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Kecamatan Pakenjeng	Pembinaan FKDM (Forum kewaspadaan Dini Daerah)	15 Orang	
9	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Kecamatan Tagogong Kidul	Pembinaan FKDM (Forum kewaspadaan Dini Daerah)	20 Orang	
10	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan	Kecamatan Tagogong Kidul	Pembinaan FKDM (Forum kewaspadaan	15 Orang	



	Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial		Dini Daerah)		
11	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Kecamatan Tagogong Kidul	Pembinaan FKDM (Forum kewaspadaan Dini Daerah)	15 Orang	
12	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Kecamatan Tagogong Kidul	Pembinaan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya	5 Orang	
13	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Kecamatan Tagogong Kidul	Pembinaan FKDM (Forum kewaspadaan Dini Daerah)	15 Orang	
14	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Kecamatan Tagogong Kidul	Pembinaan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya	5 Orang	
15	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Kecamatan Cibatu	Pembinaan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya	5 Orang	
16	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Kecamatan Malangbong	Pembinaan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya	5 Orang	
17	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Kecamatan Samarang	Pembinaan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya	5 Orang	
18	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Kecamatan Cibiuk	Pembinaan Wawasan	5 Orang	
19	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Kecamatan Sukawening	Pembinaan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya	5 Orang	
20	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Kecamatan Sukawening	Pembinaan Politik	10 Orang	
21	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Kecamatan Malangbong	Pembinaan Wawasan	5 Orang	
22	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Kecamatan Cibalong	Pembinaan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya	5 Orang	
23	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Kecamatan Kadungora	Pembinaan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya	5 Orang	
24	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Kecamatan Garut Kota	Pembinaan Wawasan	10 Orang	

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Berdasarkan Undang – Undang RI Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang – Undang RI Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional harus bersifat terpadu, menyeluruh, sitematik dan tanggap terhadap perkembangan jaman yang terdiri dari RPJP Nasional 20 tahunan, RPJM Nasional 5 Tahunan dan Renja Pemerintah Tahunan Tingkat Nasional, Propinsi dan Kabupaten/Kota.

Dalam Rangka mewujudkan sinergitas perencanaan, maka sebagai kesatuan dari sistem perencanaan pembangunan nasional, perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah turut memperhatikan pula diarah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional. Tema Pembangunan Nasional yang diusung dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 adalah : **Mempercepat Pemulihan Ketahanan Ekonomi dan Kehidupan Masyarakat** dengan Fokus : **Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi Penguatan Sistem Kesehatan Nasional.**

Sesuai dengan Tema “Mempercepat Pemulihan Ekonomi Reformasi Sosial” maka fokus pembangunan diarahkan kepada pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi, Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, Reformasi sistem Perlindungan Sosial dan Reformasi sistem Ketahanan Bencana. 7 Agenda Pembangunan Nasional sebagai berikut :

1. Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
2. Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan
3. Sumber Daya Manusia berkualitas dan bersaing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar
6. Lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim
7. Stabilitas Polhukankam dan Trasnformasi Pelayanan Publik.

Disamping itu, penyusunan perencanaan pembangunan harus berpedoman terhadap tema Pembangunan Propinsi Jawa Barat yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Propinsi Jawa Barat Tahun 2022 Yaitu **“Peningkatan Daya Daerah”** dua agenda besar Pembangunan Jawa Barat Yaitu :

1. Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19
2. Mendukung tahapan tahun ketiga pencapaian visi misi dalam RPJMD (2018-2023) yakni terwujudnya Jabar Juara Lahir dan Batin melalui Inovasi dan Kolaborasi.

Selanjutnya yaitu Telaahan visi, misi, dan program Bupati-Wakil Bupati Garut yang merupakan salah satu identifikasi faktor-faktor eksternal yang bertujuan untuk mendapatkan butir-butir kebijakan pemerintah Kabupaten terpenting, yang berhubungan, dan berpengaruh langsung terhadap perencanaan pembangunan bidang kesbangpol dalam lima tahun ke depan. Hasil telaahan pada dasarnya dimaksudkan sebagai sumber utama bagi identifikasi isu-isu strategis. Kebijakan yang diidentifikasi dapat berupa peluang atau sebaliknya ancaman/tantangan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selama kurun waktu lima tahun yang akan datang.

Visi, misi dan program Bupati-Wakil Bupati Kabupaten Garut terpilih yang penyusunannya mengacu kepada arah kebijakan pembangunan tahap III dan IV Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut 2005-2025. Dengan mempertimbangkan masalah pokok daerah, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan daerah untuk tahun 2019-2024 adalah:

**“GARUT YANG BERTAQWA, MAJU DAN SEJAHTERA”**

Makna yang terkandung dalam visi tersebut sebagai berikut :

- ✓ **Bertaqwa** : Terwujudnya masyarakat yang berakhlak mulia, menjunjung nilai-nilai luhur agama dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berlandaskan Pancasila, diindikasikan dengan adanya perubahan perilaku dan budaya dalam lingkungan kehidupan masyarakat.

- ✓ **Maju** : Terwujudnya Kabupaten Garut sebagai daerah yang mampu menggali, memanfaatkan dan mengelola segenap potensi sumberdaya yang dimiliki secara optimal untuk digunakan dalam proses pembangunan sehingga masyarakat memiliki kemampuan dalam membangun struktur ekonomi yang tangguh dan pertumbuhan ekonomi yang bernilai tambah tinggi.
- ✓ **Sejahtera**: Terwujudnya masyarakat yang sehat, cerdas dan produktif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu memainkan peran dan fungsi sebagai subjek dan objek dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah, maka dirumuskan misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 dengan mengacu rumusan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang diselaraskan dengan misi RPJPD Kabupaten Garut Tahun 2005-2025. Hasil rumusan misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 sebanyak 4 (empat) misi sebagai berikut :

**1. Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas, dan berbudaya.**

Misi kesatu menggambarkan sebuah kondisi yang ingin diciptakan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, sehat, cerdas, dan produktif dengan menjunjung nilai-nilai luhur agama dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berlandaskan Pancasila.

Dalam mewujudkan kualitas kehidupan yang agamis, sehat, cerdas dan berbudaya ini adalah dengan menciptakan kondisi obyektif yang memungkinkan interaksi solidaritas sosial untuk saling memberi dan peduli satu sama lain, kerjasama dan saling membantu, toleransi dan menghargai perbedaan, menjaga ketertiban umum, lingkungan, keterlibatan dalam demokrasi, serta meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia.

**2. Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih.**

Misi kedua menggambarkan sebuah kondisi yang ingin diciptakan dalam rangka mewujudkan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara melalui reformasi birokrasi pada seluruh aspek manajemen pemerintahan yaitu organisasi, tatalaksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, dan pola pikir.

**3. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemantapan infrastruktur sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta fungsi ruang.**

Misi ketiga menggambarkan sebuah kondisi yang ingin diciptakan dalam rangka mewujudkan ketersediaan dan pemerataan sarana dan prasarana pelayanan dasar dalam rangka peningkatan aksesibilitas dan mobilitas ekonomi dan non ekonomi, pengembangan kawasan, pengurangan kesenjangan antar masyarakat dan antar wilayah, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketangguhan terhadap bencana.

**4. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan industri pertanian serta pariwisata yang berdaya saing disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.**

Misi keempat menggambarkan sebuah kondisi yang ingin diciptakan dalam rangka mewujudkan perekonomian daerah yang berkualitas dan berdaya saing melalui peningkatan kualitas ketahanan pangan dan gizi masyarakat, peran ekonomi kerakyatan terhadap kemandirian ekonomi lokal, kontribusi sektor pariwisata dan kebudayaan sebagai lokomotif perekonomian daerah, serta realisasai investasi daerah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut selaku salah satu lembaga teknis Pemerintah Kabupaten Garut memiliki keterkaitan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan (*Misi 1 RPJMD TAHUN 2019-2024*) Pemerintah Kabupaten Garut yaitu : **“Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas, dan berbudaya”**. Dari misi ke satu tersebut, pencapaian sasaran yang didukung oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah **“Meningkatkan kualitas kesalehan sosial masyarakat”**

Di dalam mendukung capaian sasaran tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut telah menentukan tujuan Sasaran program dan kegiatan dalam mengidentifikasi permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanan. Sehubungan dengan tujuan Sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Garut berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut.

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

#### **3.2.1. Rumusan Tujuan Dalam Renstra**

Untuk mencapai visi dan misi Kepala Daerah, Bakesbangpol menetapkan tujuan pembangunan yang merupakan penjabaran dari tujuan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Misi kesatu yaitu “Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas dan berbudaya”. Tujuan tersebut kemudian dijabarkan sesuai tujuan Bakesbangpol yaitu: “Meningkatnya Kualitas Bina Karakter Bangsa”.

#### **3.3.2. Rumusan Sasaran Dalam Renstra**

Mengacu pada RPJMD Kabupaten Garut, Rencana Strategis Bakesbangpol periode 2019-2024 menetapkan tiga sasaran pembangunan yaitu:

1. Terwujudnya Kebebasan Sipil;
2. Terwujudnya Hak-hak Politik Masyarakat;
3. Meningkatnya Kapasitas Bakesbangpol;

Sesuai dengan tujuan dan sasaran Bakesbangpol Kabupaten Garut yang tertuang dalam Rencana Strategis Bakesbangpol

Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 dan rancangan akhir Revisi Rencana Strategis Bakesbangpol Kabupaten Garut telah ditetapkan tujuan dan sasaran yang dirumuskan seperti pada tabel berikut :

**Tabel 3.1**  
**Tujuan dan Sasaran**  
**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2022
1	Meningkatnya Kualitas Bina Karakter Bangsa		<b>Indeks Demokrasi Indonesia</b>	<b>Poin</b>	<b>72,14</b>
		1 Terwujudnya Kebebasan Sipil	1 Tingkat Kebebasan Berkeyakinan	Persen	75
			2 Tingkat Kebebasan Berkumpul Berserikat	Persen	80
		2 Terwujudnya Hak-hak Politik Masyarakat	1 Tingkat Kebebasan Berpendapat	Persen	90
			2 Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Politik	Persen	72
		4 Meningkatkan Kapasitas Bakesbangpol	1 Tingkat Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Bakesbangpol	Kategori	Sangat Baik

### 3.3. Program dan Kegiatan Prioritas

GERAKAN BESAR & BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
<b>GERBANG NEGERI</b> (GERAKAN ELEMEN BANGSA MEMBANGUN NEGERI MELALUI PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN ORKEMAS)	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA DAN PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	<b>3.000.000.000</b>	<b>BAKESBANGPOL</b>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemantauan dan Penguatan Ketahanan Sosial Masyarakat, Ekonomi masyarakat, SDA dalam peningkatan ketahanan bangsa</li> <li>- Pemahaman Nilai-nilai budaya luhur budaya bangsa</li> <li>- Fasilitasi pencapaian holaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan ketahanan bangsa</li> </ul>		
<b>GARDANI</b> (GERAKAN KEWASPADAAN DINI MELALUI FASILITASI, KOORDINASI DAN KERJASAMA INTELJEN, PENGAWASAN ORANG ASING DAN PENANGANAN KONFLIK)	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemantauan dan pengawasan orang asing</li> <li>- Pencegahan dan penanggulangan konflik</li> <li>- Tim Koordinasi Mitra Bakesbangpol dalam penanganan gangguan keamanan di daerah</li> <li>- Bimtek Sistem Informasi Intelejen</li> <li>- Forum Kewaspadaan dini masyarakat</li> </ul>	<b>7.500.000.000</b>	<b>BAKESBANGPOL</b>
<b>GOTIK</b> (GERAKAN POLITIK MASYARAKAT MELALUI PEMBINAAN DAN DIKLAT BELA NEGARA BAGI MASYARAKAT, PELAJAR MAHASISWA, ASN, KADES DAN ORKEMAS)	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK DAN PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendidikan Politik bagi masyarakat</li> <li>- Verifikasi Bantuan Keuangan Parpol</li> <li>- Peningkatan kapasitas bela negara</li> </ul>	<b>9.750.000.000</b>	<b>BAKESBANGPOL</b>



## BAB IV

### RENCANA KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

#### 4.1 Rencana Kegiatan

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel dan berorientasi kepada hasil, perlu disusun Penetapan Kinerja Bakesbangpol Kabupaten Garut yang merupakan ikhtisar rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2022. Penetapan kinerja ini merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2022.

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang ditetapkan pada tahun 2022 mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019-2024 sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Bakesbangpol Tahun 2019-2024 serta diselaraskan dengan rencana pencapaian tolak ukur kinerja pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut 2019-2024. Penetapan indikator kinerja utama Perangkat Daerah pada Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.1**  
**Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah TA. 2022**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2022
1	Terwujudnya Kebebasan Sipil	Tingkat Kebebasan Berkeyakinan	Persen	75
		Tingkat Kebebasan Berkumpul Berserikat	Persen	80
2	Terwujudnya Hak-hak Politik Masyarakat	Tingkat Kebebasan Berpendapat	Persen	90
		Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Politik	Persen	72
3	Meningkatnya Kapasitas Bakesbangpol	Tingkat Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Bakesbangpol	Kategori	Sangat Baik

Program/kegiatan Bakesbangpol Kabupaten Garut mencakup Sasaran, Program dan Kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun 2020 dengan mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) Bakesbangpol Tahun 2019-2024 dan disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020. Program disajikan sebagai strategi yang relevan dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Selanjutnya kegiatan disajikan dengan mengacu pada program yang relevan, sehingga kegiatan yang dirumuskan merupakan rincian yang sistematis dari program yang akan dilaksanakan. Rencana Program dan Kegiatan disesuaikan dengan pernyataan tujuan dan sasaran Bakesbangpol Kabupaten Garut.

**Tabel 4.2**  
**Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah TA. 2022**

NO.	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET 2021	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024	TARGET AKHIR PERIODE
1.	Persentase Peningkatan Pemahaman Ideologi Pancasila	90%	90%	90%	90%	90%
2.	Persentase Pembinaan ketahanan ekososbud yang terfasilitasi	90%	90%	90%	90%	90%
3.	Persentase Ormas Aktif	90%	90%	90%	90%	90%
4.	Persentase Pemahaman Politik Masyarakat	72%	72%	72%	72%	72%
5.	Persentase Penurunan Konflik Sosial	100%	100%	100%	100%	100%
6.	Persentase pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100%	100%	100%	100%	100%

#### **4.2 Pendanaan Perangkat Daerah**

Pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan ini tentu perlu didukung dengan anggaran yang memadai. Berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan dan forum SKPD yang dilakukan Bakesbangpol, maka bila seluruh program kegiatan yang diusulkan diakomodasi pada tahun 2022, total anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan seluruh kegiatan adalah

sebesar Rp. 25,830,881,705,00 (*dua puluh lima miliar delapan ratus tiga puluh juta delapan ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima rupiah*).

Total anggaran tersebut direncanakan didapatkan dari anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Garut (DAU) sebesar Rp. 25,830,881,705,00 serta anggaran Banprov dan Anggaran Pusat (DAK) sebesar Rp. 0,00. Selain program dan kegiatan dan sub kegiatan diatas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik juga tidak menutup kemungkinan untuk melaksanakan program dan kegiatan yang merupakan tugas pembantuan. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah dan/atau desa dan dari pemerintah propinsi kepada kabupaten/kota/desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Penyelenggaraan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud meliputi tugas yang diterima dan tugas pembantuan yang diberikan.

Pada akhir kegiatan akan dilaksanakan evaluasi terhadap aspek keuangan dalam mengukur efektifitas dan efisiensi dari pelaksanaan kegiatan. Dalam mengukur kinerja aspek keuangan, dilakukan melalui perhitungan efisiensi dan efektifitas kegiatan strategik. Analisis *Efisiensi* dilakukan dengan membandingkan antara *output* dengan *input* baik untuk rencana maupun realisasi. Sedangkan *Analisis efektivitas* dilakukan dengan membandingkan antara *outcome* dengan *output* baik untuk rencana maupun realisasi yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara sasaran dengan hasil (*outcomes*). Evaluasi efektifitas dan efisiensi ini kemudian disusun dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang akan disusun pada akhir pelaksanaan program dan kegiatan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Catatan Penting dalam Penyusunan Renja**

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022 merupakan Penjabaran Tahunan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Garut tahun 2022 yang memuat prioritas kegiatan dan Pendanaan indikatif. Kondisi terjadinya pandemi global Covid 19 yang mungkin berdampak pada ketidakpastian ketercapaian target, dalam hal ini memaksa perangkat daerah untuk selalu berkolaborasi dan menjaga kesinambungan pelaksanaan program.

Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program/ kegiatan yang dilaksanakan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut, baik dalam kerangka regulasi maupun mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing yang melekat pada Perangkat Daerah (PD) serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/ kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **5.2 Kaidah- kaidah Pelaksanaan**

Sehubungan dengan terbitnya Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut sebagai berikut :

- a. Penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut Tahun 2022 masih belum sempurna terkait belum lengkapnya data-data yang dibutuhkan untuk dapat memenuhi seluruh tabel yang diperlukan sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

- b. Dalam Mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap program dan kegiatan harus mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJPM Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RKPD Kabupaten Garut dan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut.
- c. Dalam menyusun Renja SKPD Tahun Anggaran 2022 ini, acuan utama yang digunakan adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut sebagai pedoman bagi SKPD dalam menyusun Rencana Strategis SKPD yang merupakan dokumen komprehensif lima tahunan, arah Kebijakan Umum – Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Garut dan rencana program indikatif dinas yang telah dirembukkan dengan seluruh unsur pelaku pembangunan Pengelolaan Keuangan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut.
- d. Renja SKPD Tahun Anggaran 2022 sebagai dokumen perencanaan tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut, yang menggambarkan program prioritas pembangunan daerah juga merupakan Acuan dalam penggunaan APBD serta sebagai acuan penyusunan RKA SKPD pada tahun rencana.
- e. Proses penyusunan Renja SKPD Tahun Anggaran 2022 merupakan hasil penyaringan aspirasi masyarakat dan dunia usaha dalam forum SKPD, konsultasi publik dan forum lintas pelaku yang dituangkan dalam rencana kegiatan tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai kewenangannya.

### **5.3. Rencana Tindak Lanjut**

Dalam rangka Pencapaian sasaran Perangkat daerah dan program program yang direncanakan maka perlu diupayakan:

- a. Meningkatkan peran serta seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam Musrenbang;
- b. Mengintensifkan koordinasi dengan seluruh Perangkat Daerah dalam rangka sinergitas perencanaan dengan memperhatikan peran dan fungsi masing masing perangkat daerah agar pembangunan yang dilaksanakan dapat berorientasi hasil atau manfaat.
- c. Menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

**BUPATI GARUT,**

**t t d**

**RUDY GUNAWAN**